



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERINDUSTRIAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025 – 2029



H. Herman Deru
Gubernur Sumatera Selatan



H. Cik Ujang
Wakil Gubernur Sumatera Selatan

“Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”

KATA PENGANTAR

Perencanaan pengembangan industri tahun 2025 – 2029 mengedepankan perspektif pembangunan lima tahunan dengan tujuan meningkatkan perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah dalam upaya menjawab tantangan ke depan meliputi posisi dan kondisi strategis Sumatera Selatan dapat dioptimalkan menjadi Pusat kemajuan dan pemacu pertumbuhan wilayah Sumatera bagian Selatan, pembangunan aneka agro industri pada bagian hilir, peningkatan nilai tambah produk industri, Pembangunan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri serta Sentra –Sentra Industri Kecil dan Menengah di 17 di Kab/Kota.

Rencana Strategis pembangunan industri Sumatera Selatan tahun 2025 – 2029 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang mewajibkan untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi dalam bentuk laporan Akuntabilitas, kemudian dikembangkan melalui media pertanggungjawaban Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Keputusan Kepala Lembaga Negara (LAN) Nomor 589/IX/6/Y/99 dan disempurnakan dengan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 yang memiliki dua fungsi utama yaitu:

1. Sebagai sarana bagi Instansi Pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.
2. Sebagai sarana evaluasi dan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi mencapai tujuan sasaran yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah dalam upaya untuk perbaikan kebijakan di masa yang akan datang.

Selain itu, penyusunan Renstra ini merupakan penerapan Undang-undang SPPN Tahun 2004 yang merupakan proses berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program yang realistis untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis ini disusun untuk menjadi arah dan pedoman dalam upaya pengembangan industri oleh instansi dan lembaga yang membidangi perindustrian di Sumatera Selatan serta berbagai pihak terkait. Dengan berpedoman kepada Renstra ini diharapkan pencapaian sasaran pembangunan industri di Sumatera Selatan dapat tercapai. Rencana Strategis ini bersifat terbuka dengan mengakomodasi dan menerima berbagai masukan, saran dan kritikan untuk penyempurnaan sehingga akan didapat rumusan yang memiliki nilai operasional.

Kepada segenap pihak yang telah membantu penyusunan, Kami mengucapkan terima kasih dan semoga Allah SWT memberikan ridho, taufiq dan hidayahNya bagi kita semua, Amin.

Palembang, 29 Oktober 2025

Kepala Dinas Perindustrian
Provinsi Sumatera Selatan



Dra. Hj. Neng Muhaiba, MM
Pembina Madya Utama, IV/d
NIP 196511121995122001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-5
1.3. Maksud dan Tujuan	I-7
1.4. Sistematika Penulisan	I-8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN	
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Gambaran Pelayanan PD	II-1
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	II-1
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-11
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-19
2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah .	II-32
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis PD	II-32
2.2.1. Permasalahan Pelayanan PD	II-32
2.2.2. Isu Strategis	II-33
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH	
KEBIJAKAN	III-1
3.1. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029	III-1
3.2. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	III-2
3.3. Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran	
Renstra PD Tahun 2025 - 2029	III-4
3.4. Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran	
Renstra PD Tahun 2025 - 2029	III-5
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1. Uraian Program	IV-1
4.2. Uraian Kegiatan	IV-1
4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator,	

target, dan Pagu Indikatif	IV-2
4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-22
4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD	IV-23
4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) PD	IV-25
BAB V PENUTUP	V - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan di bidang perindustrian pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2025 sampai dengan 2029 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting tersebut, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang akan menjamin kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Sumatera Selatan sebagai salah satu daerah otonom telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 RPJMD ini merupakan arah pedoman dan sasaran pembangunan yang akan dicapai sebagaimana visi dan misi yang telah disampaikan Gubernur Sumatera Selatan periode tahun 2025 – 2029.

Untuk mewujudkan visi misi tersebut sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029, Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan sebagai pelaksana tugas dan fungsi bidang urusan perindustrian yang merupakan salah satu urusan pilihan harus melaksanakan perencanaan pembangunan sektor Industri secara menyeluruh dan berkelanjutan serta terintegrasi tidak hanya dengan program nasional saja tetapi juga dengan program regional maupun daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan.

Oleh sebab itu Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sesuai peraturan yang ada kemudian menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029, yang merupakan rencana strategis yang mengarahkan dan memandu pencapaian tujuan dan sasaran, bagaimana mengerjakan, siapa yang mengerjakan, dan bagaimana menghadapi perubahan yang terkait dengan pembangun sektor Industri. Perencanaan ini bersifat strategis dan kontinyu dalam upaya memperbaiki kinerja Dinas Perindustrian dengan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 merupakan arah tujuan pembangunan industri yang akan dicapai, dengan memperhatikan dan menilai kembali keadaan eksisting serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan melalui analisis komprehensif terhadap keadaan lingkungan internal organisasi (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) dan mengembangkan kegiatan yang memiliki dampak terhadap organisasi. Rencana strategis ini diharapkan menjadi pedoman dalam melaksanakan

program/kegiatan bidang perindustrian secara sistimatis dalam mencapai tujuan (*objective*) dan sasaran (*goal*) yang didasarkan pada visi, misi, dan nilai-nilai (*values*) yang dianut sebagai hasil konsesus semua komponen-komponen manajemen yang ada untuk lima tahun ke depan.

Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan pada tahun anggaran 2025 ini, menyusun rencana strategis khusus dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan sektor industri Sumatera Selatan dengan tetap berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - 2026 dan RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - 2026, dengan tetap menyelaraskannya dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD Sumatera Selatan Tahun 2025-2045, RPJMD Sumatera Selatan 2025-2029, Rencana Strategis Kementerian Perindustrian RI Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sumatera Selatan Tahun 2017-2036 serta dokumen perencanaan lainnya.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025 – 2029 telah ditetapkan Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” Sedangkan pada RPJMD Sumsel telah ditetapkan **Visi Sumsel 2025-2029** yaitu “**Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua**”. Misi Sumsel 2025-2029 terdiri dari 7 Misi yaitu

Misi 1: Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing

Misi 2: Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.

Misi 3: Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.

Misi 4: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten / kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Misi 5: Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.

Misi 6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas

Misi 7 : Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan mendukung Misi Sumsel 2025-2029 pada **Misi ke-2** yaitu *Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat, Dan Misi ke-3* yaitu *Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.*

Untuk sektor industri selanjutnya dijabarkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan. Sasaran yang telah disusun dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan yang akan selalu diselaraskan dengan tema Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan. Untuk Pengembangan Industri Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 diarahkan kepada upaya menjawab tantangan ke depan meliputi posisi dan kondisi strategis Sumatera Selatan yang dapat dioptimalkan menjadi pusat kemajuan dan pemacu pertumbuhan wilayah di Sumatera Selatan, arus pembangunan aneka agro industri pada

bagian hilir, peningkatan nilai tambah produk industri (hilirisasi), Pembangunan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri serta sentra-sentra industri kecil dan menengah di 17 Kabupaten/Kota serta pengembangan dan pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4421);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Arah Pembangunan Sumatera Selatan pada RPJMN 2025-2029.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
14. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

- Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1) ;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045.
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
 20. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sumatera Selatan Tahun 2017-2037;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029.
 23. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan Selatan;

24. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Indonesia Provinsi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai:

1. Pedoman perencanaan pembangunan dan pengembangan sektor industri selama 5 (lima) tahun ke depan melalui pencapaian tujuan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan yang dijabarkan dalam rencana kerja tahunan yang dalam pelaksanaan melalui program/kegiatan/subkegiatan.
2. Sarana mengoptimalkan sumber daya pembangunan dan pengembangan industri daerah dengan penerapan perencanaan program/kegiatan/subkegiatan yang partisipatif dan berdasarkan prioritas.
3. Pedoman yang bersifat yuridis formal bagi aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada unit kerja yang bersangkutan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Sarana untuk meningkatkan kerjasama dan keterpaduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan antara Provinsi, Kab/kota dan K/L, antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bidang maupun unit kerja lainnya dalam rangka mewujudkan sinergitas perencanaan melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
5. Tolok ukur bagi aparatur pelaksana, perencana maupun pengawasan dalam menganalisis dan mengevaluasi indikator kinerja keberhasilan dari pelaksanaan program / kegiatan / subkegiatan yang telah dilaksanakan.
6. Memperhatikan prinsip kesetaraan, keadilan dan *'no one left behind'* atau tidak ada seorangpun yang tertinggal dalam

pencapaian tujuan pembangunan masing-masing Perangkat Daerah .

Tujuan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah untuk mempertegas tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dalam mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran pada sektor pembangunan dan pengembangan industri Sumatera Selatan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka dukungan terhadap pencapaian visi misi Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan mencakup Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.
- Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah mencakup Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Permasalahan dan Isu Strategis menguraikan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah, Penentuan Isu-isu Strategis.
- Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan mencakup Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029, Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029, Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029, Strategi Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025 - 2029, Penahapan Pembangunan, Penyajian Lokus, Arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan mencakup Uraian Program, Uraian Kegiatan, Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan Pagu Indikatif, Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD, Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) PD.

Bab V Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Layanan Perangkat Daerah

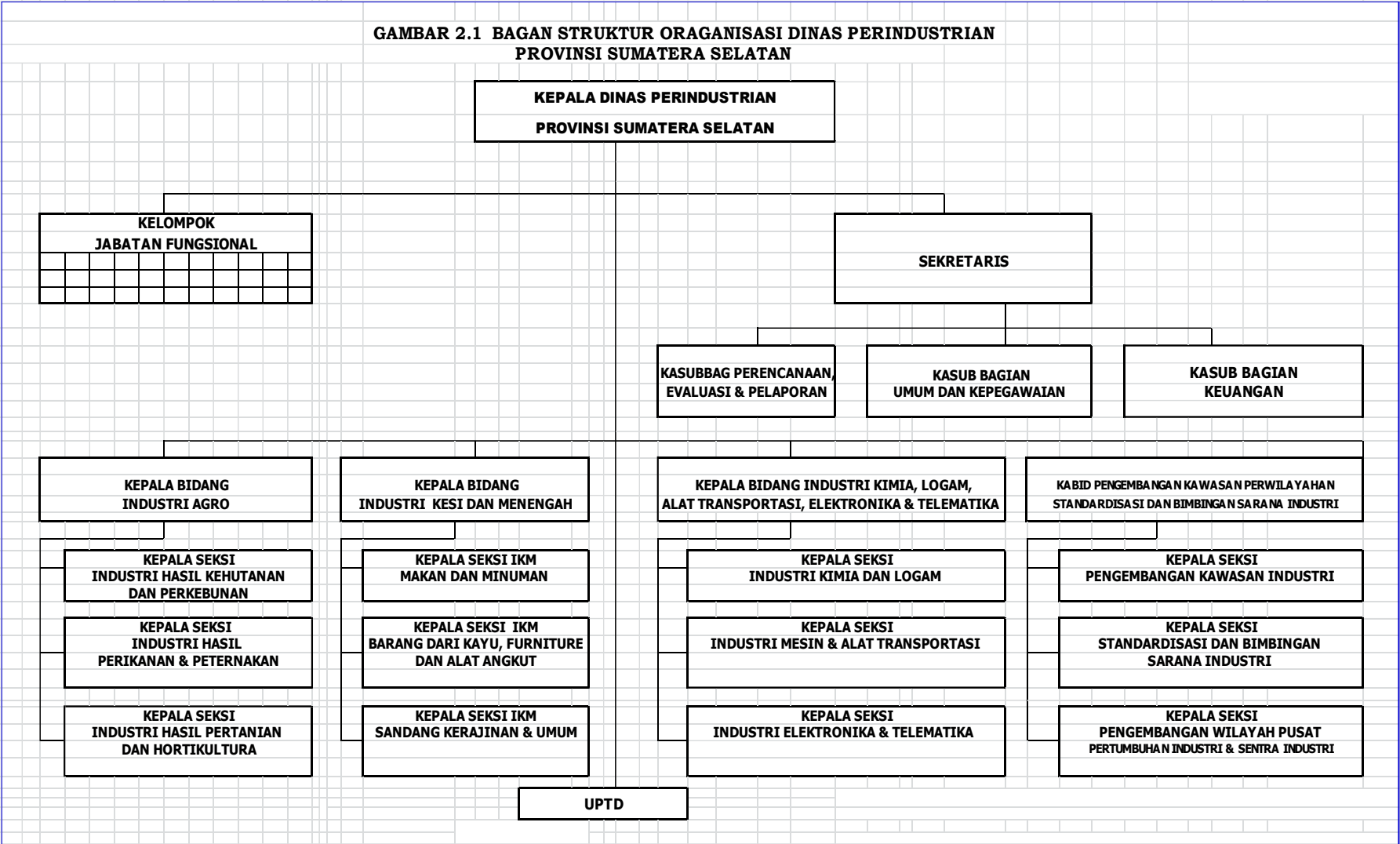
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang memiliki tugas *melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian*. Selanjutnya, sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 64 tahun 2016 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan fungsi:

- a) Menyusun rencana dan program pengembangan industri atas dasar keterpaduan kebijaksanaan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kementerian Perindustrian;
- b) Pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri melalui kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri;
- c) Pelaksanaan program kegiatan sektor industri di bidang industri agro, kimia, logam mesin, alat angkut dan industri kecil menengah;
- d) Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan dinas/instansi serta organisasi/asosiasi, dunia usaha di wilayah Provinsi;
- e) Pengawasan dan pengendalian teknis terhadap kebijaksanaan dan pengembangan industri;
- f) Pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum dan hukum;

- g) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan terlihat pada Gambar 2.1



Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 1 unit eselon II, 6 unit eselon III terdiri dari 1 Sekretariat, 4 Bidang, 1 UPTD dan Kelompok Fungsional sebagaimana dalam gambar 2.1 diatas, susunan organisasi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari;

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat yang membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 3. Subbagian Keuangan
- c. Bidang Industri Agro yang membawahi :
 1. Seksi Industri Hasil Kehutanan dan Perkebunan
 2. Seksi Industri Hasil Perikanan dan Peternakan
 3. Seksi Industri Hasil Pertanian dan Holtikultura
- d. Bidang Industri Kimia, Logam, Mesin Alat transportasi Elektronika dan Telematika yang membawahi :
 1. Seksi Industri Kimia dan Logam
 2. Seksi Industri Mesin dan alat transportasi
 3. Seksi Industri Elektronika dan Telematika
- e. Bidang Industri Kecil dan Menengah yang membawahi :
 1. Seksi Industri Kecil dan Menengah Makanan dan Minuman
 2. Seksi Industri Kecil dan Menengah Barang dari Kayu, Furniture dan Alat Angkut
 3. Seksi Industri Kecil dan Menengah Sandang, Kerajinan dan Umum
- f. Bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri yang membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri dan Sentra Industri

2. Seksi Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri
 3. Seksi Pengembangan Kawasan Industri
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ada 1 (satu), yaitu :
UPTD Industri Pangan dan Tekstil
- i. Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu Fungsional
Penyuluh Perindustrian

Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing struktur organisasi Dinas Perindustrian terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1

No	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian	Tugas Pokok	Fungsi
1.	Kepala Dinas	Melaksanakan kewenangan disentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian	a. penetapan, pelaksanaan visi dan misi dinas untuk mendukung visi dan misi daerah; b. penetapan Rencana Strategis dan pelaksanaan program kerja sektor industri sesuai dengan visi misi dinas; c. pelaksanaan pengembangan dan Peningkatan industri melalui program kerja di bidang Industri Agro, bidang Industri Kecil dan Menengah, bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika, bidang Pengembangan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri serta Unit Pelayanan Teknis, atas dasar sinkronisasi program dan kebijakan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota; d. pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka pengembangan sektor industri dan peningkatan daya saing industri; e. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama sektor industri dengan

No	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian	Tugas Pokok	Fungsi
			Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal terkait yang berada di provinsi maupun pusat ataupun lembaga, organisasi/asosiasi dan dunia usaha serta lainnya; f. pelaksanaan program dan kebijakan pengembangan perwilayahan industri, sumber daya industri dan peningkatan daya saing industri melalui pembinaan sentra – sentra IKM; g. penetapan kebijakan teknis dan program kerja dalam pelaksanaan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan; h. pengawasan dan Pengendalian mutu serta pemantauan standardisasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; i. pemberian masukan/saran dan pendapat kepada gubernur dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perindustrian sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah provinsi; j. bertindak sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang satuan kerja perangkat daerah; k. pengelolaan urusan perindustrian melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang sekretariat, bidang teknis dan unit pelayanan teknis; l. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja bidang/UPTD teknis dan kinerja Dinas secara keseluruhan; m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas pokok dan fungsinya.
2.	Sekretariat	melaksanakan pengelolaan urusan sekretariat yang	a. pengelolaan dan administrasi ketatausahaan; b. pengelolaan administrasi

No	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian	Tugas Pokok	Fungsi
		meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, ketatausahaan, umum, perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan	kepegawaian; c. pengelolaan administrasi keuangan; d. pengelolaan administrasi perlengkapan; e. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol dan hukum; f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran; g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas; i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3.	Bidang Agro	melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri skala kecil, menengah dan besar serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang industri agro	a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana/program kerja di bidang industri agro baik APBD, DAK dan APBN; b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang industri agro; c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja pengembangan dan peningkatan di bidang industri agro; d. pengkoordinasian, konsultasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang industri agro, baik antar SKPD/lembaga terkait di tingkat provinsi, Kab/kota maupun pusat; e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di industri agro sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. pemberian saran/masukan dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang industri agro;

No	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian	Tugas Pokok	Fungsi
			g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kepada tiga kepala seksi di bidang industri agro; h. pelaksanaan tugas lain di Bidang Industri Agro yang ditugaskan oleh pimpinan;
4.	Bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika	Merumuskan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan program kerja di bidang industri kimia, logam, mesin, alat transportasi, elektronika dan telematika.	a. penyusunan dan pelaksanaan rencana/program kerja di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika baik APBD, DAK dan APBN; b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika; c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja pengembangan dan peningkatan di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika; d. pengkoordinasian, konsultasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika, baik antar SKPD/lembaga terkait di tingkat provinsi, Kab/kota maupun pusat; e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. pemberian saran/masukan dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat

No	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian	Tugas Pokok	Fungsi
			Transportasi, Elektronika dan Telematika; g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kepada tiga kepala seksi di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika; h. pelaksanaan tugas lain di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika yang ditugaskan oleh pimpinan.
5.	Bidang Industri Kecil dan Menengah	mengelola bahan kebijakan teknis dan melaksanakan program kerja di bidang IKM	a. penyusunan dan pelaksanaan rencana/program kerja di bidang Industri Kecil dan Menengah baik APBD, DAK dan APBN; b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Industri Kecil dan Menengah; c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja pengembangan dan peningkatan di bidang Industri Kecil dan Menengah; d. pengkoordinasian, konsultasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Industri Kecil dan Menengah, baik antar SKPD/lembaga terkait di tingkat provinsi, Kab/kota maupun pusat; e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Industri Kecil dan Menengah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. pemberian saran/masukan dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Industri Kecil dan

No	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian	Tugas Pokok	Fungsi
			Menengah; g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kepada tiga kepala seksi di bidang Industri Kecil dan Menengah; h. pelaksanaan tugas lain di bidang Industri Kecil dan Menengah yang ditugaskan oleh pimpinan.
6.	Bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri	mengelola bahan kebijakan teknis dan melaksanakan program kerja di Bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri	a. penyusunan dan pelaksanaan rencana/program kerja di bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri baik APBD, DAK dan APBN; b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri; c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja pengembangan dan peningkatan di bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri; d. pengkoordinasian, konsultasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri, baik antar SKPD/lembaga terkait di tingkat provinsi, Kab/kota maupun pusat; e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

No	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian	Tugas Pokok	Fungsi
			f. pemberian saran/masukan dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri; g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kepada tiga kepala seksi di bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri; h. pelaksanaan tugas lain di bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri yang ditugaskan oleh pimpinan.
7.	UPTD Industri Pangan dan Tekstil	melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi industri, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri dan pelayanan kepada industri kecil dan menengah	a. merumuskan kebijakan di bidang pengembangan teknologi dan usaha industri pangan dan tekstil; b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi; c. mengkaji bahan petunjuk teknis pengembangan teknologi dan usaha industri pangan dan tekstil; d. memfasilitasi yang berkaitan dengan pengembangan teknologi dan usaha industri pangan dan tekstil; e. menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan teknologi serta usaha industri pangan dan tekstil; f. menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya administratif yang menjadi beban kerja dari Kesekretariatan, didukung dengan sumber daya manusia

sampai dengan Agustus 2025 sebanyak 33 orang PNS dan 16 orang tenaga PPPK dan untuk menunjang kegiatan/operasional kantor dinas juga memiliki aset bergerak dan tidak bergerak.

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk jumlah sumber daya manusia/ASN yang hanya 49 orang, menjadi sedikit permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dinas. Namun, hal ini tidak menjadi penghalang dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025 pegawai Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 49 orang dengan rincian jumlah pegawai pria 23 orang dan wanita 26 orang dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai

No.	Bidang	Jumlah Orang	Jenis Kelamin	
			Pria (Orang)	Wanita (Orang)
1	Bidang Sekretariat	16	8	8
2	Bidang Agro	4	2	2
3	Bidang IKLAMATET	5	3	2
4	Bidang IKM	9	3	6
5	Bidang PKPS&BSI	7	5	2
6	UPTD IPT	8	2	6

Dari struktur organisasi Dinas Perindustrian memiliki jabatan struktural dan non struktural (fungsional) sebagai berikut:

a. Pejabat Struktural

Jabatan Struktural berjumlah 25 orang, terdiri dari :

- 1 eselon II A
- 6 eselon III A dan Eselon III B
- 18 eselon IV A

b. Pejabat Fungsional

Jabatan fungsional pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 0 orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

- Fungsional Pembina Industri : - orang
- Fungsional Pe : - orang

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai menurut tingkat pendidikan

- S2 : 18 orang
- S1 : 21 orang
- D3 : 3 orang
- SLTA : 5 orang

b. Jumlah Pegawai menurut Golongan

- Gol. IV : 15 Orang
- Gol. III : 16 Orang
- Gol. II : 2 Orang
- Gol. V : 1 Orang
- Gol VII : 4 Orang
- Gol. IX : 11 Orang

2.1.2.2. Aset Dinas

Tugas kesekretariatan lainnya adalah menyelenggarakan penataan, penerbitan dan pengelolaan aset negara atau barang-barang inventaris baik barang bergerak maupun tidak bergerak. Aset yang dimiliki Dinas Perindustrian

Provinsi Sumatera Selatan per 2024 terdiri dari beberapa sarana dan prasarana, seperti yang dapat dilihat pada daftar tabel berikut ini :

Tabel 2.3 Daftar Aset Barang Tidak Bergerak
Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Penga- daan	Letak/ Alamat	Ket.
1	2	3	4	5	7
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	3,135	1981	Jalan Prajurit Kemas Ali Kel. 2 Ilir , PLG	-
2	Tanah Bangunan Gedung	19.930	1996	Jalan Raya Martapura Belitang Desa Banu Mas Kab. OKU	Bangsals Genteng
3	Tanah Bangunan Gedung	0.00	1986	Jalan Talang Kerangga No. 73 Kel. 30 Ilir Palemban g	Bangunan Koperasi Kerajinan & Ind. Songket
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	173.400	2002	Jalan Gubernur H. Bastari Kel. 15 Ulu Palemban g	Dekranasda
5	Tanah Bangunan Industri Lainnya	24.513	2016	Telok payo	Belanja modal tanah; - pengadaaan tanah untuk bangunan industri untuk pembangunan KEK Tjn.api-api
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	293	2007	Jl.Taman kenten kel. 8 Ilir plg	-
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	960	1972	Jl. Ratu Sianom Kel.3 Ilir Palemban g	-

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Penga- daan	Letak/ Alamat	Ket.
1	2	3	4	5	7
8	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1,405	2014	tanah Graha Songket milik Pemerinta h Prov. Sumsel	Tanah Graha songket milik Pemerintah Prov.Sumsel
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	46,947	2010	Jln. Demang Lebar Daun Palemban g	Bangunan Gedung UPTD Metrologi di Jl.Demang Lebar Daun.
10	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	450	1972	Jl.Ratu Sianom kel.3 Ilir Plg	APBD 2010-
11	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	450	1972	Jl.Ratu Sianom Kel.3 Ilir Palemban g	
12	Bangunan Gedung Instalasi Permanen Bangunan Gedung Tempat Ibadah	450	2009	Jl.Demang Lebar Daun No.2610 Palemban g Jalan Demang Lebar Daun	Rehap gedung mushola
14	Gedung Pertokoan/Kope rasi Pasar Permanen			Jl. Talang Kerangga No. 37 Palemban g	Gedung Koperasi Songket
15	Gedung Pos Jaga Permanen		2011	Jalan Demang Lebar Daun	pos jaga meteorologi
16	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1,405	2014	Gedung Graha Songket Jl.POM IX Kampus palemban g	Gedung Graha Songket Jl. POM IX Kampus Palembang
17	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	450		Jl.Taman Kenten Kel. 8 Ilir Palemban g	

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Penga- daan	Letak/ Alamat	Ket.
1	2	3	4	5	7
18	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	3,135		Jl.Prajurit Kemas Ali Sekojo No.29.A, Rt.19 Kel.2 Ilir Plg	Rumah Dinas
19	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	3,135		Jl.Prajurit Kemas Ali Sekojo No.30 Rt.19 Kel. 2 Ilir Plg	Rumah Dinas
20	Jalan Propinsi Kelas I		2013	UPTD Balai Pelayanan Kemetrolo gian thn.angga ran 2013	Pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kantor UPTD Balai Pelayanan Kemetrologian thn.2013
21	Jalan Propinsi Kelas I		2013	Jln. Demang Lebar gedung kantor UPTD Metrologi	Jln. Demang Lebar gedung kantor UPTD Metrologi
22	Jalan Propinsi Lain-lain	1,394	2012	Jl.Demang Lebar Daun	Pengecoran jalan dan pelataran gedung UPTD metrologi thn.2012
23	Bangunan Menara/Bak Penampung/Re servok Air Umum		2014	Jl. Gubernur H. Bastari 15 Ulu Palemban g	Pembangunan menara air, bak penampungan air bersih dan IPAL untuk UPT Texstil di UPTD BPPIP Jakabaring
24	Jaringan Distribusi Lain- lain		2013	Jl. Demang Lebar Daun di UPTD Metrologi Th. 2013	Pembuatan Jaringan LAN di UPTD metrologi th. 2013

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Penga- daan	Letak/ Alamat	Ket.
1	2	3	4	5	7
25	Jaringan Distribusi Lain- lain		2015	Jl. Gubernur H. Bastari 15 Ulu Palemban g	Belanja Modal jalan,irigasi dan jaringan,pengad aan jaringan pendirian UPT Tekstill Disperindag Prov.SS

Tabel 2.4 Daftar Aset Barang Bergerak
Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No.	Nama	Banyaknya	Keterangan
Kendaraan Dinas Perind.Prov.SS			
1	Mobil	4 Unit	
2	Sepeda Motor	2 Unit	
Peralatan Kantor			
1	Mesin Potong Rumput	1 Bh	
2	Mesin Tik	3 Bh	
3	Mesin Poto Copy	1 Bh	
4	Lemari Besi /Lemari Arsip Dinamis	11 Bh	
5	Rak Besi	1 Bh	
6	Rak Kayu/Lemari Kayu	2 Bh	
7	Filing/Kabinet	14 Bh	
8	Berangkas/Peti uang	1 Bh	
9	Alat Penghancur Kertas	2 Bh	
10	Mesin Absensi Pinjer	2 Bh	
11	Kursi Kayu/Rotan +Kursi biasa	24 Bh	
12	Meja Rapat	1 Set	
13	Kursi Tamu	5 Set	
14	Meja Komputer	6 Bh	
15	Meja Biro	4 Bh	
16	Sopa	1 Bh	
17	Lemari Pakaian	2 Bh	
18	Lemari Rias / Hias	1 Bh	
19	Lemari Es	4 Bh	
20	AC. Split	18 Bh	
21	Kipas Agin	2 Bh	
22	Kompor Gas	2 Bh	
23	Lemari Kaca	1 Bh	
24	Peralatan Rumah Tangga Lain-lain	1 Set	Cangkir, Piring, Gentong, Plastik, Tabung Gas, Dispenser (umkeb), Mangkok, Sendok,

No.	Nama	Banyaknya	Keterangan
			Garpu, Cleaning trolley, rak piring, Lemari makan.
25	Peralatan Rumah Tangga	1 Set	Kompas Gas, Kitchen 1 Set.
26	Televisi	5 Unit	(3) Unit Dinas Perind.Prov. Sumsel, (2) Graha Songket.
27	PC.Unit	19 Unit	
28	Printer	18 Unit	
29	Hordeng	1 Satu Set	
31	Laptop/ Notbook	5 Unit	
32	Monitor/Peralatan personal komputer Lain-lain	23 Unit	
33	Pesawat tlp/Facimile	4 Bh	
34	Meja Kerja Pejabat/Biro	4 Bh	
35	Proyektor+attchment/Infocus	1 Bh	
36	Kamera Film /Digital	2 Unit	(1) Kamera Film (1) Digital
37	stabilizer	2 Bh	
38	Wireless + Loudspeaker	6 Unit	
39	Screen +Swither Manual	2 Unit	
40	Meja Kerja	74 Bh	
41	Peralatan Jaringan	7 Unit	
42	UPS	5 Bh	
43	Sound system	1 Bh	
44	Kursi rapat	30 bh	(1) chairman busa (29) Polaris besi/jok
45	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Bh	

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini akan dikemukakan tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan pada periode Renstra sebelumnya (2019-2023). Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tahun tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dengan kinerja yang ditetapkan. Yang dimaksud dengan kinerja yang ditetapkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan pada periode sebelumnya, sedangkan realisasinya adalah hasil dari pelaksanaan kinerja tersebut dalam periode

Renstra yang sama. Tabel berikut menunjukkan capaian kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2020 - 2024. Tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024 berdasarkan hasil pengukurannya disajikan dalam tabel Tabel 2.1 (T-C 23) dan Tabel (T-C 24) sebagai berikut :

Tabel 2.1 (T-C 23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian
Provinsi Sumatera Selatan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan				5,60	5,72	5,72	5,83	5,10	0,72	2,30	5.01	3,69	4,39	12,85	40,20	87,47	63,29	86,08
2	Jumlah Industri Kecil Menengah				13.611	14.020	14.440	14.873	15.170	13.728	14.253	16.345	17.914	19.540	100,86	101,66	113,19	120,45	128,81
3	Jumlah Industri Menengah Besar				513	523	534	544	560	543	579	613	613	637	105,85	110,71	114,79	112,68	113,75
4	Jumlah Industri kreatif				6.606	6.705	6.801	6.908	7.115	7.053	7.846	9.192	10.263	11.538	106,77	117,02	135,16	148,57	162,16
5	Jumlah Sentra IndustriKreatif				37	39	40	41	42	37	39	40	41	42	100	100	100	100	100

Tabel 2.2 (T-C 24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Perangkat Daerah Dinas Perindustrian
Provinsi Sumatera Selatan

URAIAN (1)	ANGGARAN					REALISASI					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN					RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	2.020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)	2024 (6)	2.020 (7)	2021 (8)	2022 (9)	2023 (10)	2024 (11)	2020 (12)	2021 (13)	2022 (14)	2023 (15)	2024 (16)	REALISASI (17)	ANGGARAN (18)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	9.393.696.697	10.797.368.975	11.616.788.900	10.815.033.455	-	8.945.554.997	9.629.301.403	9.235.489.996	9.756.233.332	-	95,23	89,18	79,50	90,21	-	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	75.000.000	110.000.000	230.000.000	105.000.000	-	74.809.862	108.627.800	173.612.503	101.217.273	-	99,75	98,75	75,48	96,40	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	-	-	-	11.025.000	-	-	-	-	11.025.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	14.000.000	-	-	-	-	8.484.900	-	-	-	-	60,61	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	11.425.000	-	-	-	-	11.404.233	-	-	-	-	99,82	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	-	-	-	20.790.000	-	-	-	-	9.189.170	-	-	-	-	44,20	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	75.000.000	110.000.000	142.760.000	50.000.000	-	74.809.862	108.627.800	106.599.200	47.096.225	-	99,75	98,75	74,67	94,19	-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	30.000.000	55.000.000	-	-	-	26.910.000	54.121.048	-	-	-	89,70	98,40	-	-

URAIAN	ANGGARAN					REALISASI					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN					RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	2.020	2021	2022	2023	2024	2.020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	REALISASI	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	5.840.290.000	7.117.488.000	7.583.996.000	7.120.666.826	-	5.550.118.326	6.279.010.009	6.008.389.211	6.535.111.416	-	95,03	88,22	79,22	91,78	-	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	5.780.320.000	6.942.288.000	7.198.496.000	6.887.666.826	-	5.493.678.326	6.141.130.009	5.674.024.111	6.340.333.416	-	95,04	88,46	78,82	92,05	-	-
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	59.970.000	175.200.000	208.000.000	208.000.000	-	56.440.000	137.880.000	199.920.000	180.690.000	-	94,11	78,70	96,12	86,87	-	-
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	90.500.000	-	-	-	-	70.395.000	-	-	-	-	77,78	-	-	-
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	18.252.000	-	-	-	-	91,26	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	25.000.000	25.000.000	-	-	-	24.615.000	14.088.000	-	-	-	98,46	-	-	-
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	-	12.000.000	-	-	-	-	2.830.000	-	-	-	-	23,58	-	-	-
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	18.353.100	-	-	-	-	91,77	-	-	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	63.349.500	70.000.000	-	-	-	46.187.355	54.592.970	-	-	-	72,91	77,99	-	-
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	43.349.500	50.000.000	-	-	-	36.644.770	39.665.248	-	-	-	84,53	79,33	-	-
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	20.000.000	20.000.000	-	-	-	9.542.585	14.927.722	-	-	-	47,71	74,64	-	-

URAIAN	ANGGARAN					REALISASI					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN					RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	2.020	2021	2022	2023	2024	2.020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	REALISASI	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	25.000.000	60.000.000	70.000.000	-	-	25.000.000	13.580.000	41.092.100	-	-	100	22,63	58,70	-	-	-
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	9.614.100	-	-	-	-	96,14	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	13.998.000	-	-	-	-	46,66	-	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	25.000.000	60.000.000	20.000.000	-	-	25.000.000	13.580.000	17.480.000	-	-	100	22,63	87,40	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	984.000.000	781.160.743	1.414.790.500	1.265.211.695	-	981.830.911	728.816.528	1.091.190.206	1.254.134.972	-	99,78	93,30	77,13	99,12	-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	10.000.000	10.000.000	30.000.000	15.000.000	-	10.000.000	10.000.000	30.000.000	14.934.000	-	100,00	100,00	100,00	99,56	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	390.000.000	245.000.000	520.510.000	579.891.695	-	387.905.698	242.250.000	290.783.179	578.061.903	-	99,46	98,88	55,87	99,68	-	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	221.500.000	58.000.000	54.000.000	75.320.000	-	221.475.500	57.970.250	7.270.520	75.310.200	-	99,99	99,95	13,46	99,99	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	35.000.000	35.000.000	60.000.000	50.000.000	-	35.000.000	28.217.300	59.877.000	47.987.500	-	100	80,62	99,80	95,98	-	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	20.000.000	20.000.000	40.000.000	40.000.000	-	20.000.000	17.431.000	21.850.000	40.000.000	-	100	87,16	54,63	100,00	-	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	7.500.000	7.500.000	10.000.000	-	-	7.500.000	5.135.000	9.677.500	-	-	100	68,47	96,78	#DIV/0!	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	300.000.000	405.660.743	700.280.500	505.000.000	-	299.949.713	367.812.978	671.732.007	497.841.369	-	99,98	90,67	95,92	98,58	-	-

URAIAN	ANGGARAN					REALISASI					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN					RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	2.020	2021	2022	2023	2024	2.020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	REALISASI	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengadaan Barang Milik Daerah	-	-	419.501.000	-	-	-	-	368.500.000	-	-	-	-	87,84	-	-	-	-
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	419.501.000	-	-	-	-	368.500.000	-	-	-	-	87,84	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.308.240.000	1.389.719.232	1.615.494.100	1.686.665.845	-	1.162.849.593	1.228.589.346	1.343.228.413	1.355.414.539	-	88,89	88,41	83,15	80,36	-	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	2.000.000	2.000.000	10.000.000	5.000.000	-	2.000.000	2.000.000	10.000.000	5.000.000	-	100	100,00	100,00	100,00	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	492.600.000	495.600.000	696.197.100	767.492.845	-	393.509.593	389.319.346	473.314.069	558.793.539	-	79,88	78,56	67,99	72,81	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	813.640.000	892.119.232	909.297.000	914.173.000	-	767.340.000	389.319.346	859.914.344	791.621.000	-	94,31	43,64	94,57	86,59	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	1.161.166.697	919.500.000	639.158.800	567.489.089	-	1.150.946.305	902.177.720	531.790.208	455.762.152	-	99,12	98,12	83,20	80,31	-	-
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	-	116.550.000	197.500.000	240.000.000	400.000.000	-	116.541.511	193.531.570	199.589.500	312.697.063	-	99,99	97,99	83,16	78,17	-	-
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	40.000.000	40.000.000	60.000.000	88.500.000	-	40.000.000	39.802.150	60.000.000	64.076.000	-	100	99,51	100,00	72,40	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	257.616.697	252.000.000	339.158.800	53.989.089	-	257.598.794	239.944.000	272.200.708	53.989.089	-	99,99	95,22	80,26	100,00	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	-	747.000.000	430.000.000		25.000.000	-	736.806.000	428.900.000	-	25.000.000	-	98,64	99,74		100,00	-	-
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-													

URAIAN	ANGGARAN					REALISASI					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN					RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	2.020	2021	2022	2023	2024	2.020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	REALISASI	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	5.136.623.303	6.085.436.000	4.237.700.841	1.204.000.000	-	5.117.730.948	4.498.249.658	3.669.694.091	1.043.226.030	-	99,63	73,92	86,60	86,65	-	-
<i>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</i>	-	5.136.623.303	6.085.436.000	4.237.700.841	1.204.000.000	-	5.117.730.948	4.498.249.658	3.669.694.091	1.043.226.030	-	99,63	73,92	86,60	86,65	-	-
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	-	121.305.600	130.000.000	100.000.000	50.000.000	-	114.677.181	119.694.561	100.000.000	47.123.040	-	94,54	92,07	100,00	94,25	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	-	-	-	130.000.000	50.000.000	-	-	-	112.901.190	46.207.570	-	-	-	86,85	92,42	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-	990.000.000	1.698.620.000	1.600.000.000	444.000.000	-	983.330.600	1.496.132.599	1.594.661.104	406.438.965	-	99,33	88,08	99,67	91,54	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	-	688.940.000	1.018.752.000	700.654.350	400.000.000	-	684.988.283	559.082.000	661.415.440	324.552.299	-	99,43	54,88	94,40	81,14	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-	3.286.377.703	3.158.064.000	1.622.046.491	150.000.000	-	3.284.736.455	2.276.680.498	1.256.609.293	133.367.170	-	99,95	72,09	77,47	88,91	-	-
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	-	50.000.000	80.000.000	85.000.000	110.000.000	-	49.998.429	46.660.000	44.107.064	85.536.986	-	100	58,33	51,89	77,76	-	-
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-	115.000.000	245.000.000	100.000.000	100.000.000	-	113.059.436	202.391.753	95.382.944	192.178.640	-	98,31	82,61	95,38	192,18	-	-

URAIAN	ANGGARAN					REALISASI					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN					RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	2.020	2021	2022	2023	2024	2.020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	REALISASI	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	-	115.000.000	245.000.000	100.000.000	100.000.000	-	113.059.436	202.391.753	95.382.944	192.178.640	-	98,31	82,61	95,38	192,18	-	-
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	-	30.000.000	160.000.000	50.000.000	-	-	29.977.000	153.626.865	49.303.214	-	-	99,92	96,02	98,61	-	-	-
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegritas dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	94.614.050	-	-	-	-	94,61	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	-	85.000.000	85.000.000	50.000.000	100.000.000	-	83.082.436	48.764.888	46.079.730	97.564.590	-	97,74	57,37	92,16	97,56	-	-

URAIAN	ANGGARAN					REALISASI					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN					RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	2.020	2021	2022	2023	2024	2.020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	REALISASI	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	115.000.000	175.000.000	229.793.000	175.000.000	-	114.893.350	141.224.769	224.814.351	171.219.084	-	99,91	80,70	97,83	97,84	-	-
<i>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	-	115.000.000	175.000.000	229.793.000	175.000.000	-	114.893.350	141.224.769	224.814.351	171.219.084	-	99,91	80,70	97,83	97,84	-	-
Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	-	85.000.000	125.000.000	-	-	-	84.987.000	91.337.007	-	-	-	99,98	73,07	-	-	-	-
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	-	-	179.793.000	100.000.000	-	-	-	175.252.369	96.219.104	-	-	-	97,47	96,22	-	-
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	-	30.000.000	50.000.000	50.000.000	75.000.000	-	29.906.350	49.887.762	49.561.982	74.999.980	-	99,69	99,78	99,12	100,00	-	-
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.651.749.000	-	-	-	-	5.726.077.323	-	-	-	-	74,83	-	-	-	-	-	-
Belanja Pegawai/Aparatur	7.651.749.000	-	-	-	-	5.726.077.323	-	-	-	-	74,83	-	-	-	-	-	-
BELANJA LANGSUNG	4.212.046.815	-	-	-	-	4.190.659.760	-	-	-	-	99,49	-	-	-	-	-	-
Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	1.638.947.815	-	-	-	-	1.623.135.655	-	-	-	-	99,04	-	-	-	-	-	-

URAIAN	ANGGARAN					REALISASI					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN					RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	2.020	2021	2022	2023	2024	2.020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	REALISASI	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-		
Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik	420.262.900	-	-	-	-	417.230.509	-	-	-	-	99,28	-	-	-	-		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional	135.000.000	-	-	-	-	133.587.200	-	-	-	-	98,95	-	-	-	-		
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	180.000.000	-	-	-	-	180.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	51.000.000	-	-	-	-	51.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	21.737.100	-	-	-	-	21.737.100	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-		
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-		
Penyediaan makanan dan minuman	36.520.000	-	-	-	-	35.351.000	-	-	-	-	96,80	-	-	-	-		
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis / Perkantoran	404.800.000	-	-	-	-	394.810.000	-	-	-	-	97,53	-	-	-	-		
Penyediaan Jasa Tutor SKJ	5.500.000	-	-	-	-	5.500.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-		
Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih	51.000.000	-	-	-	-	51.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-		
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri	288.127.815	-	-	-	-	287.919.846	-	-	-	-	99,93	-	-	-	-		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	747.200.000	-	-	-	-	746.960.000	-	-	-	-	99,97	-	-	-	-		

URAIAN	ANGGARAN					REALISASI					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN					RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	2.020	2021	2022	2023	2024	2.020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	REALISASI	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	198.200.000	-	-	-	-	198.050.000	-	-	-	-	99,92	-	-	-	-		
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	220.000.000	-	-	-	-	220.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	295.000.000	-	-	-	-	294.910.000	-	-	-	-	99,97	-	-	-	-		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.000.000	-	-	-	-	34.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	76.800.000	-	-	-	-	76.800.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-		
Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas	76.800.000	-	-	-	-	76.800.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	87.224.000	-	-	-	-	86.947.500	-	-	-	-	99,68	-	-	-	-		
Pembinaan SAKIP		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		
Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP)	27.224.000	-	-	-	-	26.978.000	-	-	-	-	99,10	-	-	-	-		
Benchmarking LKJIP (DID Kinerja SAKIP)	30.000.000	-	-	-	-	29.969.500	-	-	-	-	99,90	-	-	-	-		
Bimtek Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	29.000.000	-	-	-	-	28.996.895	-	-	-	-	99,99	-	-	-	-		
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	29.000.000	-	-	-	-	28.996.895	-	-	-	-	99,99	-	-	-	-		
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	171.750.000	-	-	-	-	171.353.051	-	-	-	-	99,77	-	-	-	-		

URAIAN	ANGGARAN					REALISASI					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN					RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	2.020	2021	2022	2023	2024	2.020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	REALISASI	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Rapat Koordinasi SKPD dengan Kab/Kota dan K/L	86.750.000	-	-	-	-	86.670.131	-	-	-	-	99,91	-	-	-	-		
Pemutakhiran Data Sektor Industri Sumsel	85.000.000	-	-	-	-	84.682.920	-	-	-	-	99,63	-	-	-	-		
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	200.000.000	-	-	-	-	199.794.850	-	-	-	-	99,90	-	-	-	-		
Pengembangan Industri Potensi Daerah	200.000.000	-	-	-	-	199.794.850	-	-	-	-	99,90	-	-	-	-		
Program Pengembangan dan Pembinaan OVOP	711.125.000	-	-	-	-	710.484.334	-	-	-	-	99,91	-	-	-	-		
Pengembangan Produk Unggulan Daerah dan Pembinaan IKM Sumatera Selatan	611.125.000	-	-	-	-	610.484.334	-	-	-	-	99,90	-	-	-	-		
Pembinaan Peningkatan Produk IKM	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-		
Program Pengembangan Industri Kreatif	100.000.000	-	-	-	-	99.999.975	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-		
Diversifikasi Promosi	100.000.000	-	-	-	-	99.999.975	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-		
Program Pengembangan Sentra IKM	200.000.000	-	-	-	-	199.123.850	-	-	-	-	99,56	-	-	-	-		
Pengembangan Sentra IKM Makanan	200.000.000	-	-	-	-	199.123.850	-	-	-	-	99,56	-	-	-	-		
Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM bagi Kelompok Masyarakat Miskin	250.000.000	-	-	-	-	247.063.650	-	-	-	-	98,83	-	-	-	-		
Bimtek Menjahit Mandiri	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-		
Bimtek Perbengkelan	200.000.000	-	-	-	-	197.063.650	-	-	-	-	98,53	-	-	-	-		
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.651.749.000,00	-	-	-	-	5726077323	-	-	-	-	74,83	-	-	-	-		

URAIAN	ANGGARAN					REALISASI					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN					RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	2.020	2021	2022	2023	2024	2.020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	REALISASI	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
JUMLAH BELANJA LANGSUNG	4.212.046.815	-	-	-	-	4.190.659.760	-	-	-	-	99,49	-	-	-	-		

2.1.4. Kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan adalah Pelaku Industri, Industri Kecil dan Menengah, dan Industri Menengah Besar.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mencapai tujuan pembangunan industri yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) beberapa permasalahan internal yang menjadi tantangan yang harus dihadapi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

- Terbatasnya sarana dan prasarana kerja sehingga berdampak belum optimalnya pelayanan publik dan pembinaan kepada IKM;
- Kemajuan teknologi aplikasi pada bidang perencanaan, keuangan dan penyediaan data/informasi maupun teknologi peralatan teknis untuk IKM belum didukung oleh SDM aparatur yang trampil dan profesional di bidang keilmuannya;
- Lambatnya penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan WPPI, KPI maupun kawasan industri Sumsel.
- Belum optimalnya koordinasi dan sinergisitas program pengembangan sektor Industri antar OPD/Badan ataupun lembaga;
- Penyiapan/dukungan data-data industri yang belum tersedia dan tersaji dengan baik;
- Lambatnya kabupaten/kota dalam menyusun dokumen Rencana Pembangunan Industri daerahnya dapat menghambat pengembangan sektor Industri daerahnya serta menyulitkan implementasi RPIP Sumsel yang telah ada.

Selain tersebut diatas yang menjadi masalah dalam pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan adalah belum optimalnya pengembangan hilirisasi berbasis sektor unggulan. Secara rinci permasalahan terdiri dari :

- Belum Optimalnya Peningkatan Kemitraan dalam Hilirisasi;
 - Belum Optimalnya Promosi Terkait Potensi Hilirisasi.
 - Belum Optimalnya Peningkatan Akses Pembiayaan bagi Mitra Industri.
- Belum Optimalnya Peningkatan Fasilitas Pendukung Industri Hilir;
 - Belum Optimalnya Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung Pengembangan Fasilitas Pendukung Hilirisasi.
 - Belum Optimalnya Penyediaan Infrastruktur Pendukung Hilirisasi.
- Belum Optimalnya Peningkatan Daya Saing Produk Hilir;
 - Belum Optimalnya Penguatan Kapasitas Produksi dan Kualitas Produk.
 - Belum Optimalnya Penguatan Riset dan Inovasi Produk
- Belum Optimalnya Peningkatan Akses Pasar Produk Hilir;
 - Belum Optimalnya Penguatan Promosi dan Branding Produk.
 - Belum Optimalnya Pengembangan Jaringan Distribusi Produk

2.2.2. Isu Strategis

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2019-2024 mengalami kenaikan yang cukup baik. Data BPS Sumatera Selatan Tahun 2024, dari aspek lapangan usaha menunjukkan bahwa kontribusi terbesar terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Selatan masih bersumber dari sektor industri pengolahan sebesar 5,51 %, diikuti sektor pertambangan dan pengalihan sebesar 5,32%. Dimana sektor industri pengolahan ini terdiri dari 16 jenis industri yaitu industri batubara dan pengilangan migas, industri makanan dan minum, pengolahan tembakau, industri tekstil dan pakaian jadi, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, industri kayu, barang dari kayu dan gabus, barang anyaman dari bambu/rotan/sejenisnya, industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, industri karet, barang dari karet dan plastik, industri barang galian bukan logam, industri logam dasar, industri barang dari logam, computer, elektronik, optik dan peralatan listrik, industri mesin dan perlengkapan YTDL, industri alat angkutan, industri furniture dan industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan.

Dalam rangka pembangunan sektor Industri di Provinsi Sumatera Selatan ada beberapa isu strategis yang harus disikapi secara bijak untuk kemudian ditindaklanjuti melalui implementasi kedalam program kegiatan Dinas Perindustrian, antara lain:

1. Masih rendahnya daya saing produk lokal baik pada industri kecil maupun industri menengah.
2. Belum tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai pada Kawasan Peruntukan Industri.

3. Hilirisasi industri pengolahan dengan komoditi unggulan Sumatera Selatan seperti Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi dan Batubara berjalan lambat.
4. Dukungan terhadap program Pengentasan Kemiskinan dan Pencegahan Stunting belum optimal
5. Isu-isu Perubahan Iklim dengan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dalam perencanaan Program/Kegiatan SKPD dan pelaksanaannya belum terakomodir.
6. Implementasi Gender ke dalam program/kegiatan OPD guna meningkatkan partisipasi gender dalam pembangunan industri Provinsi Sumatera Selatan belum optimal.

Tabel 2.3 (Inmen 2 / 2025)

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DEGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH *)			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Urusan Pilihan Perindustrian	1. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja sehingga berdampak belum optimalnya pelayanan publik dan pembinaan kepada IKM 2. Kemajuan teknologi aplikasi pada bidang perencanaan, keuangan dan penyediaan data/informasi maupun teknologi peralatan teknis untuk IKM belum didukung oleh SDM aparatur yang trampil dan profesional di bidang keilmuannya 3. Lambatnya penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan	Pengembangan ekonomi daerah juga seringkali terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang belum memiliki keterampilan yang memadai. Banyak daerah, terutama di wilayah pedesaan, kekurangan tenaga kerja yang terlatih atau berpendidikan tinggi, sehingga sulit untuk memajukan sektor-sektor ekonomi yang memerlukan keahlian khusus, seperti teknologi, pengolahan produk, atau pengelolaan pariwisata. Rendahnya investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasional di daerah membuat SDM lokal tidak siap bersaing	Krisis sumber daya alam menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Peningkatan populasi, industrialisasi, dan konsumsi yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan tekanan yang semakin besar pada sumber daya alam seperti air, tanah, hutan, dan mineral. Kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam keberlanjutan ekonomi. Persediaan sumber daya alam yang semakin menipis, seperti air,	Produktivitas Indonesia masih rendah dan tertinggal dibanding negara lain seperti Korea Selatan dan Tiongkok. Selama 2015–2022, pertumbuhan produktivitas hanya naik 60 basis poin, jauh di bawah capaian negara tersebut saat berada pada tahap serupa. Rendahnya produktivitas dipengaruhi kualitas SDM, terutama perempuan, rendahnya produktivitas sektor ekonomi, keterbatasan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, serta kelembagaan yang lemah. Produktivitas tenaga kerja	Diversifikasi dan hilirisasi industri di Sumatera masih belum optimal, dengan kontribusi hanya sekitar 20 persen terhadap PDRB pada tahun 2023. Angka ini jauh di bawah potensi sesungguhnya, mengingat melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki. Minimnya diversifikasi dan hilirisasi industri di daerah-daerah ini berarti peluang untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan per kapita sangat terbatas, menjebak masyarakat dalam lingkaran kemiskinan. Ketergantungan pada	1. Masih rendahnya daya saing produk lokal baik pada industri kecil maupun industri menengah. 2. Belum tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai pada Kawasan Peruntukan Industri. 3. Hilirisasi industri pengolahan dengan komoditi unggulan Sumatera Selatan seperti Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi dan Batubara berjalan lambat. 4. Dukungan terhadap program Pengentasan Kemiskinan dan Pencegahan Stunting belum optimal. 5. Isu-isu Perubahan Iklim dengan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dalam perencanaan Program/Kegiatan SKPD dan pelaksanaannya belum terakomodir.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DEGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH *)			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	WPPI, KPI maupun kawasan industri Sumsel 4. Belum optimalnya koordinasi dan sinergisitas program pengembangan sektor Industri antar OPD/Badan ataupun lembaga 5. Penyiapan/dukungan data-data industri yang belum tersedia dan tersaji dengan baik 6. Lambatnya kabupaten/kota dalam menyusun dokumen Rencana Pembangunan Industri daerahnya dapat menghambat pengembangan sektor Industri daerahnya serta menyulitkan implementasi RPIP Sumsel yang telah ada	dalam pasar yang semakin global.	energi, dan pangan, dapat menimbulkan konflik antar negara dan antar kelompok masyarakat. Kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi dapat menyebabkan masyarakat tidak mampu mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan untuk melindungi lingkungan.	perempuan terhambat oleh norma sosial, jam kerja yang tidak fleksibel, dan minimnya layanan <i>daycare</i> terjangkau. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat, dari rata-rata 5,7 persen (2005–2010) turun menjadi 4,7 persen (2010–2015), lalu hanya berkisar sekitar 5 persen hingga 2023. Kondisi ini juga menekan pertumbuhan ekonomi potensial, sehingga ekonomi sulit tumbuh lebih cepat dan cenderung stagnan di kisaran 5 persen.	sektor primer dan minimnya pengolahan lebih lanjut menyebabkan berbagai wilayah di pulau Sumatera kehilangan peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah produk, menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas, dan membangun ekonomi yang lebih tangguh. Salah satu akar masalah utama adalah kecenderungan investasi yang masih dominan mengalir ke sektor ekstraktif dan industri hulu. Investor lebih memilih untuk menanamkan modal pada penambangan bahan mentah atau perkebunan skala besar, ketimbang pada industri pengolahan yang memerlukan investasi lebih besar dalam teknologi, sumber	6. Implementasi Gender ke dalam program/kegiatan OPD guna meningkatkan partisipasi gender dalam pembangunan industri Provinsi Sumatera Selatan belum optimal.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DEGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH *)			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					daya manusia, dan riset pengembangan. Akibatnya, potensi pengembangan industri hilir, seperti pengolahan kelapa sawit menjadi oleokimia, karet menjadi produk manufaktur, atau hasil tambang menjadi komponen industri, belum termanfaatkan secara optimal.	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029

Tujuan pembangunan industri Sumatera Selatan merupakan penjabaran implementasi tujuan pembangunan ekonomi yang termaktub dalam Visi “*Sumsel Maju Terus Untuk Semua*” dan misi Gubernur Sumatera Selatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Selanjutnya, Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai tujuan pembangunan sektor industri menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 mengemban misi yaitu:

1. Misi 2

yaitu Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan tujuannya adalah Meningkatnya daya saing dan ketahanan ekonomi daerah. Sedangkan Sasarannya adalah Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi sektor unggulan daerah.

2. Misi 3

yaitu Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim, Dengan tujuannya adalah Terwujudnya keterkaitan ketahanan pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air, Sasarannya adalah Meningkatnya pengembangan hilirisasi berbasis sektor unggulan (pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan).

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029; Norma, Standar, Prosedur dan

Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah; serta mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan maka hasil telaah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun yang menjadi Tujuan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya Daya Saing Industri. Dengan Sasaran Strategisnya adalah Meningkatnya Hasil Kinerja Pembangunan Industri Pengolahan.

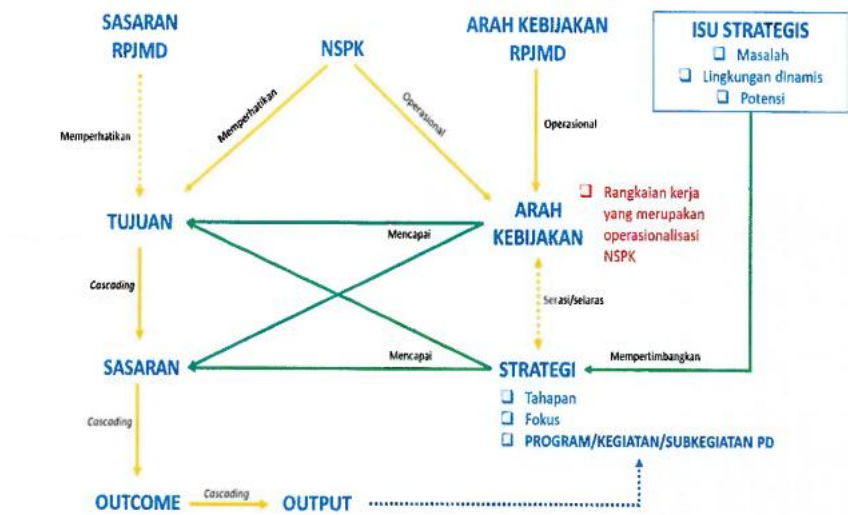
3.2. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Sasaran Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dalam Pembangunan Industri Provinsi yang harus dicapai dalam tahap 5 tahun ke depan 2025 - 2029 adalah Meningkatnya Hasil Kinerja Pembangunan Industri Pengolahan.

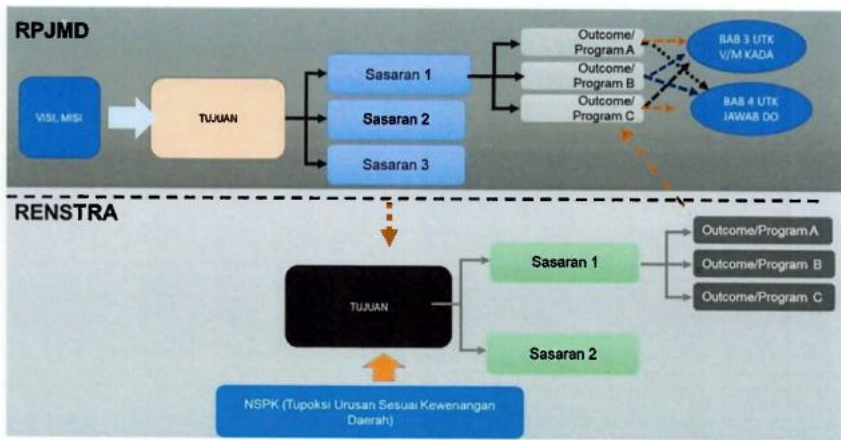
Adapun indikator yang akan dicapai dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan sesuai RPJMD Prov. Sumsel 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

1. Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB) (%)
2. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)
3. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Tujuan dan sasaran serta indikator yang akan dicapai Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2030 dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis
Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya pengembangan hilirisasi berbasis sektor unggulan (pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan)	Meningkatnya Daya Saing Industri		Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	18,27	18,90	19,53	20,03	20,53	21,11	21,67	
		Meningkatnya Hasil Kinerja Pembangunan Industri Pengolahan.	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) (%)	18,27	18,90	19,53	20,03	20,53	21,11	21,67	
			Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	5,10	5,15	5,16	5,17	5,18	5,19	5,20	
			Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	NA	2,34	2,39	2,44	2,49	2,54	2,59	

3.3. Strategi PD dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan, dibutuhkan strategi yang dapat dilakukan secara bertahap. Adapun strategi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.
Pentahapan Rencana Strategis Dinas Perindustrian
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026-2030

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan Promosi Terkait Potensi Hilirisasi	Meningkatkan Promosi Terkait Potensi Hilirisasi	Meningkatkan Promosi Terkait Potensi Hilirisasi	Meningkatkan Promosi Terkait Potensi Hilirisasi	Meningkatkan Promosi Terkait Potensi Hilirisasi
Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi Mitra Industri	Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi Mitra Industri	Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi Mitra Industri	Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi Mitra Industri	Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi Mitra Industri
Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung Pengembangan Fasilitas Pendukung Hilirisasi	Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung Pengembangan Fasilitas Pendukung Hilirisasi	Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung Pengembangan Fasilitas Pendukung Hilirisasi	Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung Pengembangan Fasilitas Pendukung Hilirisasi	Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung Pengembangan Fasilitas Pendukung Hilirisasi
Meningkatkan Penguatan Kapasitas Produksi dan Kualitas Produk	Meningkatkan Penguatan Kapasitas Produksi dan Kualitas Produk	Meningkatkan Penguatan Kapasitas Produksi dan Kualitas Produk	Meningkatkan Penguatan Kapasitas Produksi dan Kualitas Produk	Meningkatkan Penguatan Kapasitas Produksi dan Kualitas Produk
Meningkatkan Penguatan Kapasitas Produksi dan Kualitas Produk iset dan Inovasi Produk	Meningkatkan Penguatan Kapasitas Produksi dan Kualitas Produk iset dan Inovasi Produk	Meningkatkan Penguatan Kapasitas Produksi dan Kualitas Produk iset dan Inovasi Produk	Meningkatkan Penguatan Kapasitas Produksi dan Kualitas Produk iset dan Inovasi Produk	Meningkatkan Penguatan Kapasitas Produksi dan Kualitas Produk iset dan Inovasi Produk
Meningkatkan Penguatan Promosi dan Branding Produk	Meningkatkan Penguatan Promosi dan Branding Produk	Meningkatkan Penguatan Promosi dan Branding Produk	Meningkatkan Penguatan Promosi dan Branding Produk	Meningkatkan Penguatan Promosi dan Branding Produk
Meningkatkan Pengembangan Jaringan Distribusi Produk	Meningkatkan Pengembangan Jaringan Distribusi Produk	Meningkatkan Pengembangan Jaringan Distribusi Produk	Meningkatkan Pengembangan Jaringan Distribusi Produk	Meningkatkan Pengembangan Jaringan Distribusi Produk

3.4. Arah Kebijakan PD dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2030, yaitu pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan Rencana Strategis
Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan

No.	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota. 2. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 81/M-IND/PER/10/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana Prasarana Industri 5. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 6/M-IND/PER/6/2016 tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional	1. Peningkatan Kemitraan dalam Hilirisasi	1. Meningkatkan Promosi terkait Potensi Hilirisasi 2. Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi Mitra Industri	
		2. Peningkatan Fasilitas Pendukung Industri Hilir	1. Regulasi dan Kebijakan yang mendukung pengembangan fasilitas pendukung hilirisasi 2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur pendukung hilirisasi	
		3. Peningkatan Daya Saing Produk Hilir	1. Meningkatkan penguatan kapasitas produksi dan kualitas produk 2. Meningkatkan penguatan riset dan inovasi produk	
		4. Peningkatan Akses Pasar Produk Hilir	1. Meningkatkan penguatan promosi dan branding produk 2. Meningkatkan pengembangan jaringan distribusi produk	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, kegiatan dan subkegiatan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan sesuai nomenklatur Kepmendagri No. 900.1-2850 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta tanggal 31 Juli 2025.

4.1. Uraian Program

Program yang akan dilaksanakan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 terdiri 4 Program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
4. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

4.2. Uraian Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 terdiri dari 10 kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
10. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
11. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

4.3. Uraian Sub Kegiatan

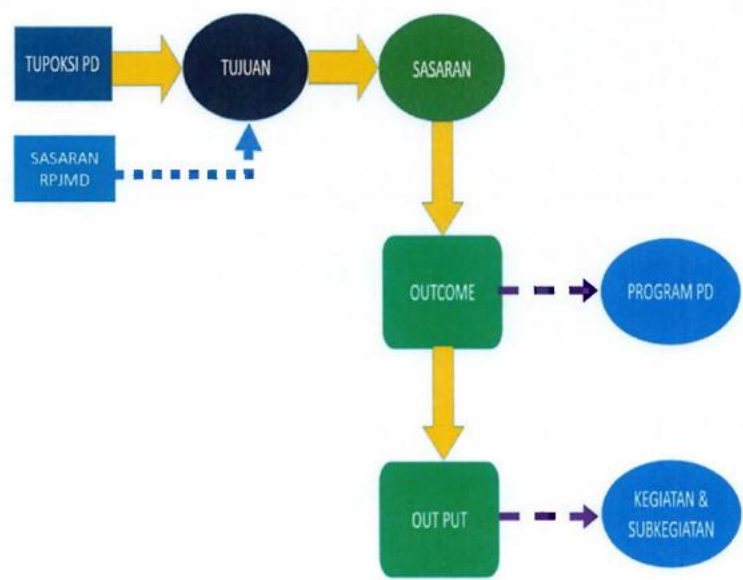
Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 terdiri dari 48 sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
9. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
10. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
11. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
12. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
13. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

14. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
15. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
16. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
17. Koordinasi Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
18. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
19. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
20. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
21. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
23. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
24. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
25. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
26. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
27. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
28. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
29. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
30. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
31. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
33. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
34. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
35. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
36. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
37. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

38. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
39. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
40. Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri.
41. Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri.
42. Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
43. Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi
44. Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka Penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
45. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Provinsi
46. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
47. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Matrik Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat pada Tabel 4.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026 - 2030 Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 4.1.
Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra 2025-2029
Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan

[illegible]

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (7)	KET. (8)
			Meningkatnya Kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	dokumen	Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
				dokumen	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
				laporan	Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri.	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri.	
				rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri.	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri.	
				rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
				dokumen	-Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	
				Persentase	Persentase Izin Usaha Industri yang diterbitkan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
				Persentase	<i>Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri</i>	<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</i>	
				dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala industri menengah yang lokasinya lintas kab/kota, dan indstri besar sepanjang merupakan Penanaman	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka Penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (7)	KET. (8)
				dokumen	Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat. Jumlah Dokumen laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten / kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	Risk Base Approach (OSS RBA) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Provinsi	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	100%	Tersedianya Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
				100%	Tersedianya Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
				dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (7)	KET. (8)
			Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	
				Persentase	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Persentase	<i>Persentase ketercapaian terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	
				dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	
				dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	
				laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				-	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				-	Jumlah Dokumen Hasil	Penyelenggaraan Walidata Pendukung	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (7)	KET. (8)
					Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Statistik Sektoral Daerah	
				100%	<i>Persentase ketersediaan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	
				Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Persentase	<i>Persentase ketersediaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</i>	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	
				dokumen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Persentase	<i>Persentase ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	
				dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase	<i>Persentase ketercapaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (7)	KET. (8)
				Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
				laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase	<i>Persentase ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	
				Unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				100%	<i>Persentase ketercapaian tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
				laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				100%	<i>terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (7)	KET. (8)
				unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2.
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan
Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100%	14.848.040.965	100%	21.285.146.797	100%	35.193.986.592	100%	36.193.986.592	100%	37.193.986.592	100%	38.193.986.592		
			11.508.639.134		12.368.190.167		16.939.474.175		17.643.786.592		18.268.786.592		18.268.986.592		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.	100%	77.743.825	100%	60.460.825	100%	859.000.000	100%	859.000.000	100%	884.000.000	100%	884.000.000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	Rp164.000.000	-	Rp164.000.000	-	Rp164.000.000	-	Rp164.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	Rp20.000.000	1 dokumen	Rp20.000.000	1 dokumen	Rp20.000.000	1 dokumen	Rp20.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	Rp20.000.000	1 dokumen	Rp20.000.000	1 dokumen	Rp20.000.000	1 dokumen	Rp20.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	Rp20.000.000	1 dokumen	Rp20.000.000	1 dokumen	Rp20.000.000	1 dokumen	Rp20.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	Rp20.000.000	1 dokumen	Rp20.000.000	1 dokumen	Rp20.000.000	1 dokumen	Rp20.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	38.783.000	1 laporan	27.000.000	1 laporan	Rp175.000.000	1 laporan	Rp175.000.000	1 laporan	Rp180.000.000	1 laporan	Rp180.000.000		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	18.960.825	1 laporan	13.460.825	1 laporan	Rp163.000.000	1 laporan	Rp163.000.000	1 laporan	Rp163.000.000	1 laporan	Rp163.000.000		
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	-	-	-	-	-	Rp137.000.000	-	Rp137.000.000	-	Rp137.000.000	-	Rp137.000.000		
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	-	-	Rp140.000.000	-	Rp140.000.000	-	Rp160.000.000	-	Rp160.000.000		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	100%	7.351.106.000	100%	8.673.655.328	100%	9.150.474.175	100%	9.644.786.592	100%	10.144.786.592	100%	10.144.986.592		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		7.127.606.000		8.400.155.328		Rp8.750.474.175		Rp9.244.786.592		Rp9.744.786.592		Rp9.744.986.592		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		220.000.000		250.000.000		Rp250.000.000		Rp250.000.000		Rp250.000.000		Rp250.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	Rp50.000.000	1 dokumen	Rp50.000.000	1 dokumen	Rp50.000.000	1 dokumen	Rp50.000.000		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	-	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	Rp50.000.000	1 dokumen	Rp50.000.000	1 dokumen	Rp50.000.000	1 dokumen	Rp50.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3.500.000	1 laporan	3.500.000	1 laporan	Rp50.000.000	1 laporan	Rp50.000.000	1 laporan	Rp50.000.000	1 laporan	Rp50.000.000		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	52.444.295	100%	42.680.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000		
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	48.884.295	1 dokumen	42.680.000	1 dokumen	Rp115.000.000	1 dokumen	Rp115.000.000	1 dokumen	Rp115.000.000	1 dokumen	Rp115.000.000		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	3.560.000	1 laporan	-	1 laporan	Rp115.000.000	1 laporan	Rp115.000.000	1 laporan	Rp115.000.000	1 laporan	Rp115.000.000		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	36.402.000	100%	36.402.000	100%	420.000.000	100%	410.000.000	100%	410.000.000	100%	410.000.000		
Koordinasi Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	Rp120.000.000	1 dokumen	Rp120.000.000	1 dokumen	Rp120.000.000	1 dokumen	Rp120.000.000		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	36.402.000	1 Orang	36.402.000	10 Orang	Rp300.000.000	10 Orang	Rp290.000.000	10 Orang	Rp290.000.000	10 Orang	Rp290.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100%	946.909.059	100%	829.299.169	100%	1.950.000.000	100%	2.450.000.000	100%	2.450.000.000	100%	2.450.000.000		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.741.530	1 Paket	30.000.000	1 Paket	Rp100.000.000	1 Paket	Rp100.000.000	1 Paket	Rp100.000.000	1 Paket	Rp100.000.000		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	204.117.940	1 Paket	157.249.580	1 Paket	Rp450.000.000	1 Paket	Rp550.000.000	1 Paket	Rp550.000.000	1 Paket	Rp550.000.000		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	49.000.000	1 Paket	49.000.000	1 Paket	Rp250.000.000	1 Paket	Rp350.000.000	1 Paket	Rp350.000.000	1 Paket	Rp350.000.000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	Rp150.000.000	1 Paket	Rp150.000.000	1 Paket	Rp150.000.000	1 Paket	Rp150.000.000		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	27.281.500	1 Paket	27.281.500	1 Paket	Rp50.000.000	1 Paket	Rp50.000.000	1 Paket	Rp50.000.000	1 Paket	Rp50.000.000		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	Rp50.000.000	1 dokumen	Rp50.000.000	1 dokumen	Rp50.000.000	1 dokumen	Rp50.000.000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	555.768.089	1 laporan	515.768.089	1 laporan	Rp900.000.000	1 laporan	Rp1.200.000.000	1 laporan	Rp1.200.000.000	1 laporan	Rp1.200.000.000		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	0	-	0	100%	Rp450.000.000		Rp-		Rp-		Rp-		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	-	-	-	1 unit	Rp450.000.000		Rp-		Rp-		Rp-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	100%	2.035.833.955	100%	2.017.492.845	100%	2.430.000.000	100%	2.600.000.000	100%	2.700.000.000	100%	2.700.000.000		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	Rp70.000.000	1 laporan	Rp70.000.000	1 laporan	Rp70.000.000	1 laporan	Rp70.000.000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	767.492.845	1 laporan	767.492.845	1 laporan	Rp1.120.000.000	1 laporan	Rp1.290.000.000	1 laporan	Rp1.390.000.000	1 laporan	Rp1.390.000.000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1.258.341.110	1 laporan	1.240.000.000	1 laporan	Rp1.240.000.000	1 laporan	Rp1.240.000.000	1 laporan	Rp1.240.000.000	1 laporan	Rp1.240.000.000		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik	100%	1.008.200.000	100%	708.200.000	100%	1.450.000.000	100%	1.450.000.000	100%	1.450.000.000	100%	1.450.000.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 unit	416.500.000	9 unit	416.500.000	9 unit	Rp500.000.000	9 unit	Rp500.000.000	9 unit	Rp500.000.000	9 unit	Rp500.000.000		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	41.700.000	1 unit	41.700.000	1 unit	Rp250.000.000	1 unit	Rp250.000.000	1 unit	Rp250.000.000	1 unit	Rp250.000.000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	550.000.000	1 unit	250.000.000	1 unit	Rp700.000.000	1 unit	Rp700.000.000	1 unit	Rp700.000.000	1 unit	Rp700.000.000		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengeolahan terhadap PDRB (%))	18,90	2.924.954.831	19,53	8.641.895.905	20,03	16.679.512.417	20,53	16.925.200.000	21,11	17.250.200.000	21,67	18.200.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase pertumbuhan industri pengolahan (%)	5,15		5,16		5,17		5,18		5,19		5,20			
	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	2,34		2,39		2,44		2,49		2,54		2,59			
	Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	100%	2.924.954.831	100%	8.641.895.905	100%	16.679.512.417	100%	16.925.200.000	100%	17.250.200.000	100%	18.200.000.000		
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1 dokumen	44.970.705	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	Rp260.000.000	1 dokumen	Rp260.000.000	1 dokumen	Rp300.000.000	1 dokumen	Rp300.000.000		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 dokumen	135.341.600	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	Rp726.000.000	1 dokumen	Rp726.000.000	1 dokumen	Rp726.000.000	1 dokumen	Rp726.000.000		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	1.013.529.000	1 dokumen	7.130.129.000	1 dokumen	Rp7.968.512.417	1 dokumen	Rp7.968.200.000	1 dokumen	Rp7.968.200.000	1 dokumen	Rp8.378.000.000		Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	612.864.732	1 dokumen	339.915.937	1 dokumen	Rp2.100.000.000	1 dokumen	Rp2.246.000.000	1 dokumen	Rp2.246.000.000	1 dokumen	Rp2.346.000.000		Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	1.078.920.000	1 dokumen	1.061.850.968	1 dokumen	Rp2.320.000.000	1 dokumen	Rp2.420.000.000	1 dokumen	Rp2.660.000.000	1 dokumen	Rp3.000.000.000	100.000 sultan muda sumsel	Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	39.328.794	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	Rp255.000.000	1 dokumen	Rp255.000.000	1 dokumen	Rp300.000.000	1 dokumen	Rp300.000.000		
Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri.	Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri.	1 laporan	-	-	-	Rp800.000.000	Rp800.000.000				Rp800.000.000		Rp850.000.000		
Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri.	1 rekomendasi	-	-	-	Rp800.000.000	Rp800.000.000				Rp800.000.000		Rp800.000.000		
Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 rekomendasi	-	-	-	Rp800.000.000	Rp800.000.000				Rp800.000.000		Rp800.000.000		
Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	~Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1 dokumen	-	-	-	Rp650.000.000	Rp650.000.000				Rp650.000.000		Rp700.000.000		
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang diterbitkan	100 %	242.128.750	100 %	150.060.725	100 %	825.000.000	100 %	850.000.000	100 %	875.000.000	100 %	900.000.000		
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian															

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	100%	242.128.750	100%	150.060.725	100%	825.000.000	100%	850.000.000	100%	875.000.000	100%	900.000.000		
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka Penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala industri menengah yang lokasinya lintas kab/kota, dan indstri besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat.	1 dokumen	96.723.025	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	Rp412.500.000	1 dokumen	Rp425.000.000	1 dokumen	Rp437.500.000	1 dokumen	Rp450.000.000		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	1 dokumen	145.405.725	1 dokumen	75.060.725	1 dokumen	Rp412.500.000	1 dokumen	Rp425.000.000	1 dokumen	Rp437.500.000	1 dokumen	Rp450.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten / kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat														
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	100%	172.318.250	100%	125.000.000	100%	750.000.000	100%	775.000.000	100%	800.000.000	100%	825.000.000		
	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	100%	172.318.250	100%	125.000.000	100%	750.000.000	100%	775.000.000	100%	800.000.000	100%	825.000.000		
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 dokumen	87.940.250	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	Rp375.000.000	1 dokumen	Rp387.500.000	1 dokumen	Rp400.000.000	1 dokumen	Rp412.500.000		
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 dokumen	84.378.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	Rp375.000.000	1 dokumen	Rp387.500.000	1 dokumen	Rp400.000.000	1 dokumen	Rp412.500.000		
TOTAL PAGU			14.848.040.965		Rp21.285.146.797		Rp35.193.986.592		Rp36.193.986.592		Rp37.193.986.592		Rp38.193.986.592		

4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan daerah dibangun berdasarkan skema berbasis data, kolaboratif, dan berkelanjutan yang diselaraskan dengan RPJMD dan RPJMN serta difokuskan melalui Musrenbang dan RKPD tahunan. Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Program Strategis Gubernur Sumaera Selatan yang memuat 12 Program Strategis Utama sebagai kerangka utama mempercepat kemajuan Sumatera Selatan, ekonomi yang kuat, SDM unggul dan tata kelola bersih.

Sub kegiatan Prioritas Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan disajikan pada tabel 4.3. dibawah ini:

Tabel 4.3.
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	100.000 Sultan Muda Sumsel	Pelaku Industri yang memiliki jiwa enterprenuer yang tangguh dalam menghadapi ekonomi global.	Kegiatan : Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pelatihan, Bimtek bagi pelaku industri dalam meningkatkan kualitas produk yang bernilai daya saing yang tinggi.

Dalam rangka mendukung keberhasilan 100.000 Sultan Muda Sumsel, Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan menyusun dan melaksanakan berbagai sub kegiatan yang bersifat lintas sektor dan partisipatif, guna menciptakan dampak langsung terhadap masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat. Kegiatan yang mendukung Program Prioritas 100.000 Sultan Muda Sumsel adalah Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan

Industri Provinsi. Sedangkan subkegiatannya adalah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. Melalui pelaksanaan sub kegiatan yang tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, 100.000 Sultan Muda Sumsel diharapkan mampu menciptakan investasi dan lapangan kerja, serta meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga.

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

Penetapan indikator kinerja utama perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir periode masa jabatan. Pencapaian Tujuan Strategis Utama yang akan dicapai Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan selama periode Tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya Daya Saing Industri dengan indikatornya Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi sektor industri terhadap PDRB) (%), Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%), Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%).

Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 3 (tiga) indikator sebagai berikut pada Tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO. (1)	INDIKATOR (2)	SATUAN (3)	TARGET TAHUN						KET. (10)
			2025 (4)	2026 (5)	2027 (6)	2028 (7)	2029 (8)	2030 (9)	
1.	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB) (%)	Persentase (%)	18,90	19,53	20,03	20,53	21,11	21,67	
2.	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	Persentase (%)	5,15	5,16	5,17	5,18	5,19	5,20	
3.	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi	Persentase (%)	2,34	2,39	2,44	2,49	2,54	2,59	

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) PD

Penetapan indikator kinerja kunci perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja perangkat daerah Tahun 2025 - 2029. Indikator Kinerja Kunci berdasarkan Kinerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintah Daerah Kewenangan Provinsi memiliki tujuan dan *outcome* sesuai urusan. Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan memiliki tujuan dan *outcome* Urusan Perindustrian berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.

Indikator Kinerja Kunci Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut pada Tabel 4.5 dibawah ini.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO. (1)	INDIKATOR (2)	SATUAN (3)	TARGET TAHUN						KET. (10)
			2025 (4)	2026 (5)	2027 (6)	2028 (7)	2029 (8)	2030 (9)	
1	Pertambahan jumlah industri besar di Provinsi	%	15%	17%	19%	21%	23%	25%	
2	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	57,95%	59,34%	61,25%	63,19%	65,87%	67,89%	
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait.	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait.	%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Uaha Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait.	%	100	100	100	100	100	100	
6	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	%	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan 2025 - 2029 ini menjabarkan tujuan strategis yang akan menjadi capaian kinerja Dinas Perindustrian Prov. Sumsel lima (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat masalah dan isu strategis serta langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan serta bagaimana mencapainya agar tujuan sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Periodeisasi Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan sama dengan Periodeisasi RPJMD berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 sehingga tidak sama dengan masa jabatan kepala daerah, yakni 2025-2030.

Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program yang termuat RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.

Untuk itu, dengan suatu keyakinan secara optimis diharapkan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Tahun 2025-2029 ini dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan program kegiatan yang tertuang didalam rencana kerja tahunan OPD, dengan tetap menyelaraskannya dengan RKPD pada tahun penyusunan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan industri tidak semata-mata bergantung pada keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan tetapi kesuksesan pembangunan industri Provinsi Sumatera Selatan membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku

kepentingan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi dan masyarakat luas.

Palembang, 29 Oktober 2025

Kepala Dinas Perindustrian
Provinsi Sumatera Selatan



Dra. Hj. Neng Muhaiba, MM
Pembina Madya Utama, IV/d
NIP 196511121995122001